

## **Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Berbasis *Cash Towards Accrual* Tahun Anggaran 2010 - 2012**

*Evaluation of Application of Accounting Standard Financial Statements Against the District Government accrual Bondowoso Based Cash Towards Budget Year 2010 - 2012*

Fitria Prehatiningtias

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: [tiyakdongdong@gmail.com](mailto:tiyakdongdong@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Penerapan standar akuntansi terhadap penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso berbasis *Cash Towards Accrual* Tahun Anggaran 2010 – 2012. Objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2011 – 2012. Namun penelitian ini dibatasi, hanya kepada pos – pos akun yang berkaitan dengan basis akrual saja, yaitu kas, piutang, aset, dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menggunakan basis akrual pada penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan basis CTA yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan tahun 2010 hingga 2012. Dalam hal penyajian kas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih memiliki kas di Bendahara Penerimaan. Penyajian piutang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Penyajian akun cadangan piutang sebagai akun lawan dari piutang telah sesuai karena telah sama dengan jumlah piutang yang disajikan di neraca. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencatatan penyusutan aset tetap. Penyusutan yang dilakukan cukup baik karena sudah melakukan penilaian usia manfaat aset tetap yang dimiliki dan telah memiliki prosedur penyusutan aset tetap sendiri. b). Pemerintah Daerah berbasis CTA saja masih mengalami kendala, diantaranya kurang representatif dalam pengakuan pendapatan, pencatatan kewajiban masih minim.

**Kata Kunci:** kas, piutang, aset, kewajiban, CTA, SAP

### **Abstract**

*This study aims to determine the " Application of accounting standards for the preparation of financial statements of the regency government based accrual Cash Towards Fiscal Year 2010-2012 . The research object in this study , namely the Local Government financial statements budget year 2011-2012 . However, this research is limited , only the post - the post of account relating to the accrual basis only, ie cash , accounts receivable , assets , and liabilities . The results showed that : a ) . Bondowoso District Government has an accrual basis in the preparation of financial statements using CTA base approach can be seen in the Financial Statements 2010 to 2012 . In terms of the presentation of cash , the regency government still has cash in the Treasurer Receipts . Presentation of accounts has been undertaken by the Government of regency. Presentation of accounts receivable reserves as opposed to accounts receivable have been equally appropriate for the number of accounts that are presented in the balance sheet . Regency government has done recording depreciation on fixed assets. b ) . based CTA Local Government are still experiencing problems , including less representative in the recognition of revenue , the recording of the obligation is still minimal .*

**Keywords :** cash , accounts receivable , assets , liabilities , CTA , SAP

### **Pendahuluan**

Dalam PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pada saat ini menurut PSAP Nomor 01 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Oleh karena itu kita sering

menyebutnya dengan cash toward accrual. Standar akuntansi pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Pemerintah Indonesia dalam mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun

anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas." Artinya, seharusnya pemerintah daerah sudah melakukan pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sejak tahun 2008 lalu. Namun, peraturan pendukung pun baru disahkan pada tahun 2010, yaitu PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam PP tersebut ditegaskan kembali tentang penerapan basis akrual yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat pendukung, yaitu kerangka konseptual dan PSAP 01-12 (Simanjuntak, Binsar H. 2010).

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayar kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (Simanjuntak, 2010).

Untuk menghadapi permasalahan tentang standar penyusunan laporan keuangan pemerintah, maka pemerintah Indonesia mengambil sebuah solusi untuk mencapai tujuan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Dengan menetapkan suatu metode dalam penyusunan laporan pemerintahan dengan menggunakan basis kas modifikasi atau yang sering disebut dengan *Cash Towards Accrual* (CTA). CTA adalah pendekatan akuntansi yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas dan menampilkan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual (Manao, 2006). Dalam penerapan CTA juga harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan sepengetahuan peneliti di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan masih sangat kurang. Di sisi lain hasil penelitian sebelumnya mengenai akuntansi akrual di negara-negara lain belum menyediakan bukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para pengadopsi akuntansi akrual dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Cohen et al., 2007; Christiaens, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003; Brusca, 1997, dalam Kusuma : 2013).

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka penelitian ini akan meneliti tentang penerapan "Penerapan standar akuntansi basis akrual terhadap penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso berbasis Cash Towards Accrual Tahun Anggaran 2010 - 2012". Mengingat tentang dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010, bahwa standar akuntansi basis akrual akan efektif penuh diterapkan tahun 2015. Sehingga Basis CTA sebagai jembatan untuk menuju penerapan basis akrual sepenuhnya.

## Metode Penelitian

### Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan apakah penerapan standar akuntansi sudah diaplikasikan pada penyusunan laporan keuangan pemerintah melalui pendekatan basis CTA. Dengan adanya CTA diharapkan akan terdapat beberapa perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan agar siap untuk menerapkan basis akrual sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

### Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun oleh arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2011 – 2012.

### Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2011 – 2012. Namun penelitian ini dibatasi, hanya kepada pos – pos akun yang berkaitan dengan basis akrual saja. Adapun akun – akun ialah kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban yang disajikan dalam neraca.

## Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah ada dari berbagai sumber yaitu, laporan keuangan Pemerintah Daerah Bondowoso Tahun anggaran 2010 – 2012. Setelah dipelajari, dibaca, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi (membuat rangkuman yang inti). Langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahapan terakhir melakukan pemeriksaan keabsahan data.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Peneliti dapat membandingkan data-data lain yang berasal dari buku ataupun internet untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## Hasil Penelitian

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (daerah) mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak X selaku Bidang Anggaran.

“Transparansi yang merupakan salah satu tujuan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Karena itu Pemerintah daerah Bondowoso berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan yang merupakan sumber informasi finansial yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Bondowoso. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal.”

Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash towards Accrual*), dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual. Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor

71 Tahun 2010.

Mengingat bahwa kas biasanya adalah komponen terbesar dalam aset lancar, piutang adalah akun yang sangat berhubungan erat dengan pendapatan, aset tetap adalah bagian dari aset yang seringkali memiliki porsi cukup besar dalam neraca. Kewajiban juga akan menjadi fokus penelitian karena kewajiban merupakan sebuah akun baru yang harus dimunculkan bilamana suatu entitas mengadopsi basis akrual. Kewajiban dapat muncul karena berbagai hal seperti ketika terjadi transaksi belanja atau pengeluaran dan ketika pemerintah memerlukan biaya untuk mendanai aktivitasnya.

## Pembahasan

### A. Penerapan CTA

#### a. Kas

Kas adalah suatu komponen aset lancar yang sifatnya paling likuid. Kas merupakan uang tunai ataupun saldo simpanan di bank yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk mendanai kegiatan Pemerintah. Dalam akuntansi pemerintahan, kas dalam neraca entitas pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis yaitu kas di Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Sedangkan Kas di Pemerintahan Kabupaten Bondowoso terdiri dari Kas di Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di RSUD, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 -2012 (Rp juta)

Uraian	31/12/12	31/12/11	31/12/10
ASET			
ASET LANCAR	<b>96.872.616</b>	<b>125.274.505</b>	<b>130.760.872</b>
KAS	<b>74.817.550</b>	<b>105.521.932</b>	<b>94.989.363</b>
Kas di Daerah	67.010.875	98.854.439	88.454.315
Kas di Bendahara Penerimaan	50.773	104.436	93.913
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di RSUD	7.755.900	6.563.057	6.441.134

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2013

Di dalam basis CTA, yang dimaksud dengan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah kas yang berada di Kas Umum Daerah. Dengan demikian kontribusi rata-rata kas di Kas Daerah sangat besar pada akun Kas di Neraca, yaitu sekitar 93,1% di tahun 2010 dan meningkat menjadi 93,7% di tahun 2011 dan turun menjadi 89,6% di tahun 2012. Kas di Bendahara Penerimaan biasanya adalah kas yang berasal dari pungutan pajak baik itu uang tunai maupun saldo bank yang belum sempat disetorkan Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan sangatlah kecil hanya sebesar 0,09% di tahun 2010 dan 2011 dimana cenderung stabil dan kemudian turun menjadi 0,06% di tahun 2012. Di dalam peraturan perundangan-undangan, entitas Pemerintah sebenarnya tidak diperbolehkan memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan dalam Neraca yang dilaporkan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap disiplin dan

tanggungjawab entitas pelaksana untuk segera menyetorkan kas tersebut ke Kas Umum Daerah. Namun apabila memang terdapat saldo, maka saldo tersebut harus dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

#### b. Piutang

Piutang adalah salah satu akun Neraca yang cukup penting. Di dalam Neraca, piutang merupakan bagian dari aset lancar yang paling likuid setelah kas. Piutang menggambarkan adanya hak Pemerintah untuk menerima penerimaan berupa Kas di Kas Umum Negara/Pemerintah dari Pemerintah Pusat, daerah lain, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya. Pada tanggal cut off, apabila terdapat hak Pemerintah untuk menagih, maka nilai nominal tagihan tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset berupa piutang dalam Neraca.

Di dalam konsep akrual, piutang muncul akibat terdapatnya transaksi yang akan menghasilkan penerimaan atau pendapatan bagi entitas namun belum menerima kasnya. Oleh karena itu, pencatatan piutang akan beriringan dengan pencatatan pendapatan dan akan dihapus ketika pendapatan tersebut sudah benar-benar diterima.

Tabel 2 Neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 -2012 (Rp juta)

Uraian	31/12/12	31/12/11	31/12/10
<b>PIUTANG</b>	<b>10.925.202</b>	<b>6.349.753</b>	<b>17.125.93</b>
Piutang Pajak	1.949.027	1.245.940	8
Piutang Retribusi	4.486.447	2.518.448	1.183.251
Piutang Dana Bagi Hasil	5.416.391	2.203.760	336.876
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	3.491.144
Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman ke BUMD	4.542.300	5.000.800	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	10.612.729	376.602	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(11.543.935)	0,00	12.084.66
Piutang Lain-lain			6
Penyisihan Piutang			0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2013

Berdasarkan Tabel 2, komponen piutang pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, piutang dana alokasi umum, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan piutang lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan berbagai macam transaksi yang bisa berupa transaksi pertukaran maupun non pertukaran yang bisa menimbulkan piutang. Berkaitan dengan penerimaan pajak dan retribusi, Pemerintah akan menimbulkan piutang penerimaan pajak dan retribusi karena tidak semua wajib pajak melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan pajak ataupun keadaan yang sebenarnya. Apabila penerimaan tersebut masih belum masuk ke Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka hak tagih tersebut harus masuk sebagai piutang Pemerintah Kota.

Sebagai penyeimbang dalam pencatatan piutang basis

CTA, pencatatan Piutang pada akun Cadangan Piutang dimunculkan sebagai hak tagih Pemerintah. Akun cadangan piutang hanya sebagai akun lawan dari akun Piutang dalam basis CTA. Cadangan piutang disajikan sebagai bagian dari pos Ekuitas Dana Lncara dalam Ekuitas bersama dengan akun cadangan-cadangan lainnya yang hanya bersifat menyeimbangkan sisi aktiva dan pasiva Neraca.

Tabel 3 Neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 -2012 (Rp Juta)

Uraian	31/12/12	31/12/11	31/12/10
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>91.300.724</b>	117.690.743	130.291.317
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	74.766.776	105.417.496	94.895.449
Cadangan Piutang	10.925.202	6.349.753	17.125.938
Cadangan Persediaan	11.129.863	13.402.819	18.645.5700
Dana yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(5.571.891)	(7.583.762)	(469.555)
Pendapatan yang Ditangguhkan	50.773.500	104.436	93.913

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2013

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 nilai Cadangan Piutang sama besarnya dengan jumlah piutang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan CTA sejak lama yaitu dari tahun 2010 hingga 2012, karena telah mampu beradaptasi dengan konsep semi akrual yang diperkenalkan CTA sehingga penyajian pos-pos akrual representatif.

#### c. Aset Tetap

Menurut SAP, aset tetap diakui apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selain itu, aset tetap juga diukur berdasarkan harga perolehan beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut.

Tabel 4 Neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 -2012 (Rp juta)

Uraian	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31/12/10
<b>SET TETAP</b>	<b>1.815.542.693</b>	<b>1.698.509.607</b>	<b>1.534.161.530</b>
<b>Tanah</b>	<b>215.491.860</b>	<b>311.364.328</b>	<b>311.274.005</b>
Tanah	215.491.860	311.364.328	311.274.005
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>234.682.942</b>	<b>201.232.961</b>	<b>169.431.668</b>
Alat-alat berat	9.136.867	7.754.024	7.754.024
Alat-alat angkutan	57.133.217	53.184.680	44.392.857
Alat Bengkel	4.234.317	4.129.362	4.061.972
Alat Pertanian dan Peternakan	4.475.250	3.970.850	2.792.729
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	68.584.194	62.596.175	59.842.488
Alat Studio dan Alat Komunikasi	6.650.724	5.586.173	3.952.180
Alat Ukur	113.028	72.794	24.643
Alat-alat Kedokteran	52.921.900	43.191.782	31.523.434
Alat-alat Laboratorium	31.281.561	20.670.537	15.010.759
Alat Keamanan	151.879	76.579	76.579

<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>495.173.673</b>	<b>409.931.374</b>	<b>366.766.092</b>
Bangunan Gedung	492.101.836	407.032.405	363.867.123
Bangunan Monumen	3.071.836	2.898.968	2.898.968
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>847.003.415</b>	<b>755.564.825</b>	<b>669.871.577</b>
Jalan dan Jembatan	413.169.424	359.298.12537	319.941.633
Bangunan Air (irigasi)	403.722.842	372.043.718	11.845.288
Instalasi	17.117.425	13.819.869	331.941.633
Jaringan	12.993.722	10.403.111	6.948.677
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>20.185.330</b>	<b>17.203.997</b>	<b>16.788.598</b>
Buku dan Perpustakaan	17.246.250	14.568.943	14.258.514
Barang Bercorak Kesenian	1.313.039	1.249.880	1.150.037
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1.626.040	1.385.174	1.380.047
<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>3.005.471</b>	<b>3.212.120</b>	<b>29.587</b>
Konstruksi dalam Pengerjaan	3.005.471	3.212.120	29.587
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2013

Salah satu yang berkaitan dengan adanya pengakuan aset tetap ialah pengakuan penyusutan aset tetap yang ada pada Neraca. Penyusutan aset tetap diatur dalam PSAP No.07 Paragraf 53 sampai 57. Dalam SAP berbasis CTA, kecuali aset tetap tertentu seperti tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Dalam basis CTA, penyusutan dianggap sebagai penyesuaian nilai dari aset tetap sehubungan dengan berkurangnya nilai kapasitas dan manfaat suatu aset tetap. Oleh karena tidak ada peraturan yang mengatur untuk mencatat nilai penyusutan tersebut sebagai beban, maka nilai penyusutan tersebut disajikan dalam akun akumulasi penyusutan di Neraca sebagai komponen pengurang aset tetap. Hal ini terjadi karena basis CTA mengakui pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Artinya, segala bentuk pengeluaran yang tidak secara nyata berupa kas yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah yang tidak dapat dicatat atau diakui sebagai belanja, kecuali jika suatu entitas Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Keuangan yang bersifat opsional dalam SAP PP 24/2005.

#### d. Kewajiban

Kewajiban adalah komponen neraca bagian pasiva yang muncul akibat sebuah transaksi entitas yang terjadi di masa lalu untuk mendapatkan manfaat namun belum melakukan pengeluaran atau pembayaran kas sehingga harus dilunasi dimasa depan. Kewajiban dapat muncul dari pinjaman, biaya yang belum dibayar, dan transaksi dengan pihak ketiga. Dalam SAP, kewajiban atau utang diakui pada saat pinjaman atau kewajiban timbul.

Kewajiban di Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso ada dua, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan

Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan untuk dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang dapat dilunasi dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Didalam SAP, kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Transfer, Utang SPN dan Utang lain-lain yang terdiri dari Utang Luar Negeri dan Utang Biaya. Kewajiban jangka panjang terdiri dari Utang Luar Negeri, Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pembelian Cicilan dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Tabel 6 Neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 -2012 (Rp Juta)

Uraian	31/12/12	31/12/11	31/12/10
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.571.891	7.583.762	603.168
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.571.891	7.583.762	469.555
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Pajak	0,00	7.768	38.883
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	133.613	267.226
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.571.891	7.442.380	163.445
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	133.613
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2013

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 hingga 2012, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan jumlah kewajiban jangka panjang bahkan sebesar Rp 0,0. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki akun Utang Pembelian Cicilan, karena tidak melakukan pembelian cicilan.

Kewajiban atau utang timbul manakala terdapat masalah birokrasi atau ada kendala dalam operasional sehingga diperoleh suatu sumber daya harus segera terjadi tetapi kas yang dibutuhkan belum ada. Pada tahun 2010, kas tidak dapat memenuhi dengan segera kebutuhan tersebut sehingga muncul Utang Dalam Negeri.

#### B. Kendala Dalam Penerapan CTA

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dilakukan dengan tujuan agar dapat menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Tetapi penyusunan basis akrual secara penuh dirasa sulit sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso menggunakan basis CTA seperti yang diungkapkan oleh Bapak R:

“Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso belum menerapkan basis akrual, kami masih menggunakan basis CTA sebagai penghubung untuk mengantarkan organisasi dari basis kas ke basis akrual. Dalam penyusunan

laporan keuangan Pemerintah Daerah berbasis CTA saja masih mengalami kendala, diantaranya kurang representatif dalam pengakuan pendapatan, pencatatan kewajiban masih minim.”

Berikut ini pemaparan mengenai kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam penerapan CTA:

1. Penyajian kurang representatif mengenai Kas
  - a) Metode kas basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
  - b) Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
  - c) Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
  - d) Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
  - e) Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas
2. Pencatatan kewajiban masih minim

Selain terkait dengan substansi pencatatan piutang, pencatatan kewajiban dalam basis CTA juga memperlihatkan kelemahan. Seperti Tabel Piutang menunjukkan bahwa penyajian nilai kewajiban adalah minim, bahkan dalam pencatatan kewajiban hanya muncul Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Dalam basis kas murni, walaupun sangat kecil porsinya, Pemerintah hanya memiliki kewajiban jangka pendek berupa pinjaman yang bisa berupa uang muka dari kas maupun perhitungan pihak ketiga.

## Kesimpulan, Dan Keterbatasan

### Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan basis CTA dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan basis CTA. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan beberapa SKPD di Kabupaten Bondowoso. Objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan beberapa laporan keuangan satuan unit kerja Kabupaten Bondowoso tahun Anggaran 2011 – 2012. Namun penelitian ini dibatasi, hanya kepada pos – pos akun yang berkaitan dengan basis akrual saja. Adapun akun – akun ialah kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban yang disajikan dalam neraca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menggunakan basis akrual pada penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan basis CTA yang

dapat dilihat pada Laporan Keuangan tahun 2010 hingga 2012.

1. Dalam hal penyajian kas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih memiliki kas di Bendahara Penerimaan. Jika masih terdapat kas di Bendahara Penerimaan artinya pengelolaan penerimaan kas kurang baik karena kas yang diterima tidak segera disetorkan ke Kas Daerah.
2. Penyajian piutang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Penyajian akun cadangan piutang sebagai akun lawan dari piutang telah sesuai karena telah sama dengan jumlah piutang yang disajikan di neraca.
3. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan pencatatan penyusutan aset tetap. Penyusutan yang dilakukan cukup baik karena sudah melakukan penilaian usia manfaat aset tetap yang dimiliki dan telah memiliki prosedur penyusutan aset tetap sendiri.
4. Terkait dengan kewajiban, pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso cukup baik karena tidak memiliki Utang PFK. Karena utang PFK terkait dengan kas yang berada di Bendahara Pengeluaran. Porsi kewajiban juga kecil karena hanya memiliki kewajiban di akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki pengelolaan kas yang baik sehingga semua pengeluaran kas dilakukan tepat waktu.
- b. Pemerintah Daerah berbasis CTA saja masih mengalami kendala, diantaranya kurang representatif dalam pengakuan pendapatan, pencatatan kewajiban masih minim.

### Keterbatasan

Secara keseluruhan kualitas pencatatan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintahan dengan basis CTA menunjukkan sudah baik, tapi penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu

- a. ketidaklengkapan informasi secara detail sehingga tidak didapat pengetahuan lebih jauh mengenai penerapan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso terutama terkait dengan kelemahan penerapan basis CTA.
- b. akun yang diteliti terbatas pada kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban, sehingga tidak dapat menelaah lebih jauh keadaan akun lain.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta  
 Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE  
 Damayanti, Etrin. 2012. *Analisis Implementasi penerapan standar*

*akuntansi basis akrual terhadap penyusunan Laporan keuangan pemerintah Kota berbasis Cash Towards Acruial Tahun Anggaran 2007 – 2009.* Universitas Indonesia

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Kusuma, Muhamad Indra Yudha. 2013. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintahan*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Moelong, L. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nordiwani, Dedi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Puspitasari, Winda. 2011. *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. Universitas Andalas : Padang
- Republik Indonesia.2003. UU Nomor 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia.2004. UU Nomor 1 Tahun 2004, *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia.2004. UU Nomor 15 Tahun 2004, *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia.2004. UU Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. UU33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2005. PP Nomor 24 Tahun 2005, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2005. PP Nomor 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia.2010. PP Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Ritonga, Rahmansyah. 2006. *Kas Basis Vs Akrual Basis*. Jurnal (Online). Tersedia di <http://sumut.kemenag.go.id/>
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta
- 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

